

# Pengertian Pembangunan Politik

Meidi Kosandi, Ph.D.



## PENDAHULUAN

---

Jika kita memperhatikan perubahan-perubahan politik yang telah dijalankan oleh para elit politik Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 hingga saat ini, dapat segera terlihat adanya interaksi antara faktor-faktor historis, politik, sosial, filosofis, ideologis, institusional, hingga ekonomi. Transformasi politik tersebut terdiri dari perubahan dari era kolonialisme ke kemerdekaan, pergantian sistem pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), perubahan pada masa demokrasi terpimpin, pembangunan pada masa Orde Baru, hingga reformasi pasca krisis ekonomi dan politik pasca Orde Baru. Proses transformasi pada periode-periode tersebut memperlihatkan kepada kita bagaimana faktor-faktor di atas membentuk struktur dan perilaku politik pada masing-masing era. Jika dielaborasi lebih lanjut, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor di atas pada setiap era termasuk perbedaan di antaranya tingkat perkembangannya.

Perubahan politik pada era reformasi, sekedar menyebutkan contoh, memperlihatkan bagaimana lembaga-lembaga politik mulai dari MPR, DPR, Presiden, Kabinet, dan MA mengalami perubahan distribusi kekuasaan. Pada masa sebelumnya di era Orde Baru, kekuasaan terkonsentrasi pada presiden. Lembaga-lembaga politik nasional lainnya hanya berfungsi sebagai pendukung kekuasaan presiden. Peluang terjadinya kontrol atas kekuasaan presiden sangat lemah. Namun, pasca Orde Baru kekuasaan lebih terdistribusi dan berimbang di antara lembaga-lembaga tersebut. Kontrol terhadap kekuasaan presiden lebih dimungkinkan melalui mekanisme pemakzulan oleh MPR setelah mendapatkan usulan DPR yang telah diuji oleh lembaga yudikatif yang baru dibentuk, yaitu MK. Lembaga-lembaga baru selain MK juga dibentuk untuk penguatan demokrasi, seperti DPD dan lembaga-lembaga independen lainnya sebagai penopang, seperti KPK, KY, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, dan sebagainya.

Konteks sosial, ekonomi, dan historis yang mewarnai perubahan politik juga menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pada era-era sebelumnya. Krisis ekonomi 1997-1998 misalnya, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1965 ketika terjadi perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Karakter pembeda yang dimaksud di antaranya adalah dimensi internasional dan ekspos kekerasan militer. Bantuan pemulihan krisis dari IMF diiringi dengan parameter-parameter pemeliharaan kestabilan politik, seperti perimbangan dan kontrol kekuasaan, jaringan pengaman sosial, serta pengurangan kontrol negara terhadap ekonomi masyarakat melalui deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi. Sementara itu, informasi tentang praktik kekerasan politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru begitu luas dan mudah menjangkau masyarakat sehingga menyebabkan legitimasi pemerintah semakin menurun.

Landasan filosofis dan ideologis yang memengaruhi perubahan tersebut juga berbeda secara signifikan. Jika developmentalisme merupakan gagasan utama yang melandasi perubahan politik pada awal Orde Baru maka gagasan demokrasi dan otonomi lah yang menjadi landasan dilakukannya perubahan politik pada era reformasi.

Ulasan ringkas tentang pokok-pokok perubahan politik di atas memberikan gambaran tentang fokus bahasan pembangunan politik. Pembangunan politik merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk menjelaskan perubahan politik yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di suatu negara. Inilah yang menjadi fokus di dalam Modul 1 ini. Pembahasan di dalam Modul 1 ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian *pertama* akan membicarakan tentang konsep pembangunan politik, asal usul, dan perkembangan terminologinya. Bagian *kedua* lebih mendiskusikan tentang teori dan pendekatan yang digunakan untuk memandang dan menjelaskan pembangunan politik. Sementara bagian terakhir digunakan untuk mengelaborasi interelasi (kesalingterkaitan) antara pembangunan politik dengan peristiwa, gagasan, kebijakan, dan perilaku politik lainnya.

Setelah membaca modul ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah para mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pembangunan politik. Secara khusus, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang materi yang terdiri dari:

1. Konsep pembangunan politik.
2. Teori pembangunan politik.
3. Fungsi-fungsi pembangunan politik.

Modul 1 ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan Belajar (KB). Masing-masing KB berisi tentang materi pembelajaran, latihan, petunjuk mengerjakan latihan, rangkuman, dan tes formatif.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Konsep Pembangunan Politik

Pembangunan politik merupakan salah satu bidang studi di dalam ilmu politik yang berkembang pada masa setelah Perang Dunia II seiring dengan berkembangnya wacana tentang pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara baru merdeka. Wacana pembangunan ekonomi sendiri berkembang sebagai bentuk politik etis di kalangan negara-negara Barat kepada bangsa-bangsa yang sebelumnya menjadi korban imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. Meskipun secara ekonomi pada hakikatnya pembangunan di negara-negara bekas jajahan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa Barat, dengan cara turut menopang kelimpahan (*spillover*) produksi dan investasi di negara-negara Barat sendiri. Negara baru merdeka umumnya menyediakan pasar dan lahan investasi dengan biaya produksi yang efisien bagi bangsa Barat karena akses yang mudah terhadap sumber daya alam serta tingkat upah buruh yang rendah.

Di dalam kerangka pembangunan tersebut, muncullah gagasan pembangunan politik yang dibedakan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagian ilmuwan politik memandang pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial, sebagian lagi melihat bahwa pembangunan politik merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial, sedangkan sebagian lagi menyimpulkan bahwa pembangunan politik merupakan implikasi logis dari pembangunan ekonomi dan sosial. Namun pada prinsipnya, para ilmuwan politik sepaham bahwa konsep pembangunan politik sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan sosial.

Gagasan pembangunan politik sendiri pada awalnya muncul dan dipergunakan oleh para pejabat pemerintahan, bukannya ilmuwan (Lucian W. Pye, 1964). Konsep itu digunakan untuk memberi nama pada jenis pembangunan lainnya yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Ukuran pembangunan ekonomi pada saat kemunculan gagasan tersebut sering disimplifikasi hingga terbatas pada pertumbuhan ekonomi (GDP) dan pendapatan per kapita (per *capita* GNP). Ukuran pembangunan sosial di dalam banyak literatur juga sering mengalami simplifikasi pada aspek sosial ekonominya, seperti tingkat kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Sementara itu, pada saat

yang sama, pemerintah negara-negara baru melakukan pembangunan institusi politik yang tidak diukur dalam konsepsi pembangunan ekonomi dan sosial. Aktivitas pembangunan yang dimaksud misalnya mencakup pembentukan budaya politik, pengembangan lembaga-lembaga politik dan birokrasi, pemberdayaan politik masyarakat, mobilisasi pembangunan, pembinaan integrasi nasional, dan sebagainya. Dalam banyak dokumen dan retorika politik negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, pada saat itu aktivitas-aktivitas pembangunan non sosial-ekonomi tersebut yang kemudian disebut sebagai pembangunan politik (Pye, 1964 dan J. Roland Pennock, 1965).

Sejak awal pembentukannya, konsep pembangunan politik memang didefinisikan secara renggang. Batasan konsep ini tidak terlalu jelas. Cakupan studi pembangunan politik sangat luas, mulai dari aspek institusi, normatif, sistem politik, hingga budaya. Konsep ini seakan digunakan untuk menyederhanakan konstruksi atas upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah struktur dan proses politik. Masalah-masalah yang dibahas di dalam pembangunan politik sangat banyak, termasuk konflik etnis, mobilisasi masyarakat, demokratisasi, radikalisme, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, sebelum lebih jauh membahas tentang pembangunan politik secara lebih jauh di dalam bab-bab selanjutnya, pada bab ini kita akan mengupas dengan sedikit analitis terhadap konsep pembangunan politik dan perdebatan seputarnya.

Banyak ilmuwan yang telah mencoba merumuskan definisi tentang pembangunan politik. Di antaranya adalah Peter Burnell dan Gabriel A. Almond, sekedar memberikan contoh beberapa definisi. Menurut Burnell (2003), secara umum pembangunan politik adalah pembangunan institusi, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang membentuk sistem kekuasaan politik di dalam suatu masyarakat. Menurut Gabriel A. Almond (1966), pembangunan politik adalah seperangkat struktur, proses, dan perubahan kebijakan politik yang terjadi di dalam konteks yang lebih luas dari modernisasi sosial-ekonomi. Pembangunan politik terjadi sebagian sebagai konsekuensi dari modernisasi dan semakin berkembang sebagai penyebab dari modernisasi.

Selain dua definisi yang disebutkan di atas, masih banyak definisi lain yang telah coba dirumuskan oleh para ilmuwan politik. Pye (1964) di dalam karyanya yang berjudul "*Aspects of Political Development*" mencoba mengklasifikasikan definisi-definisi pembangunan politik ke dalam 10 kategori. Kesepuluh kategori tersebut adalah sebagai berikut:

**Pembangunan politik** adalah suatu perubahan politik terencana dari suatu kondisi ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan seluruh bagian dari masyarakatnya.

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
2. Pembangunan politik sebagai tipe politik dari masyarakat industri.
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara bangsa.
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
10. Pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensional.

Uraian ringkas tentang beragam definisi yang dibuat untuk menjelaskan pembangunan politik perlu diberi beberapa catatan berikut.

**Pertama**, substansi dari konsep pembangunan politik adalah suatu perubahan politik terencana dari suatu kondisi politik tertentu ke arah kondisi lainnya. Yang diperdebatkan oleh banyak ilmuwan politik dalam wacana pembangunan politik adalah ke arah mana perubahan tersebut dirancang dan dijalankan; apakah perubahan itu ke arah demokrasi, stabilitas, modernisasi, atau sebaliknya, justru mengarah kepada otoriterisme, instabilitas, dan keterbelakangan.

**Kedua**, frase pembangunan politik merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan banyak aspek yang berubah di dalam politik hanya dengan satu frase. Keuntungan dari cara ini adalah menggambarkan seluruh perubahan politik terencana hanya dengan satu frase, yaitu pembangunan politik. Akan tetapi kekurangannya adalah luasnya ketercakupan konsep ini menyebabkan munculnya kebingungan tentang batasannya dan perdebatan tentang arah perubahannya. Perdebatan yang

panjang tentang konsep ini cukup banyak sehingga penggunaannya menjadi sangat terbatas dalam literatur politik dalam satu dekade terakhir ini. Umumnya ilmuwan cenderung memfokuskan studi ke dalam salah satu atau beberapa aspek saja dari pembangunan politik. Misalnya studi tentang demokratisasi. Studi tentang demokratisasi ini semakin populer pada tahun 1990-an dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Blok Timur.

**Ketiga**, penggunaan konsep ini juga menimbulkan beberapa masalah metodologis yang mengundang kritik dari para ilmuwan politik. Konsep ini lahir di negara-negara Barat dan karenanya dinilai mengandung bias Barat. Gagasan pembangunan politik didasarkan oleh adanya asumsi bahwa sejumlah negara membutuhkan perubahan politik agar dapat memodernisasi struktur, proses, dan perilaku politiknya dari suatu kondisi awal menuju kondisi akhir pada saat proses perubahan tersebut dievaluasi.

Kondisi akhir yang dibayangkan sebagai tujuan perubahan politik adalah kebajikan, suatu kondisi politik yang dianggap terbaik bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, kebajikan tersebut disebut juga sebagai modernitas, yang merupakan lawan dari kondisi awal yang tradisional. Inilah yang memunculkan persepsi bahwa pembangunan politik pada hakikatnya merupakan modernisasi di bidang politik. Pangkal persoalannya adalah bahwa sistem politik modern yang dibayangkan adalah sistem politik di negara-negara Barat. Sedangkan sistem politik tradisional yang dibayangkan adalah sistem politik di negara-negara berkembang. Proses pembangunan politik sendiri dibayangkan sebagai sebuah proses perubahan yang bersifat linear dari tradisional ke modern. Di dalam praktiknya, pembangunan politik yang dianjurkan berdasarkan pengalaman negara-negara Barat tidak mudah diaplikasikan di negara-negara berkembang. Dalam banyak kasus, aplikasi modernisasi politik yang mengacu kepada sistem Barat lebih sering tidak benar-benar menghasilkan karakteristik negara modern seperti yang dibayangkan sebelumnya. Hal ini karena setiap negara berkembang memiliki partikularitas di dalam sejarah, budaya, potensi konflik internal, sumber daya alam, tingkat pendidikan, serta tingkat pembangunan ekonominya. Memperlakukan pembangunan politik sebagai sebuah konsep universal, yaitu konsep yang berlaku umum bagi semua negara berarti mengabaikan aspek partikularitas di atas. Implikasinya, hasil pembangunan politik yang dianjurkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Deskripsi tentang karakteristik sistem politik yang modern yang dituju oleh pembangunan politik cukup bervariasi di dalam pandangan berbagai

ilmuwan politik. Pye (1964) berpandangan bahwa pembangunan politik semestinya mengembangkan nilai-nilai kesetaraan (*equality*), kapasitas sistem politik (*capacity*), dan diferensiasi (*differentialization and specialization*). Senada dengan Pye, ilmuwan politik yang lain, yaitu Huntington (1966), berpandangan bahwa karakteristik tersebut seharusnya mengandung nilai-nilai demokrasi, integrasi, partisipasi, dan rasionalisasi.

Dalam kacamata Pye, kesetaraan merupakan salah satu gagasan yang ingin dicapai setiap proses pembangunan politik. Kesetaraan yang dimaksud oleh Pye menyangkut tiga hal, yaitu persamaan hak untuk berpartisipasi di dalam politik, persamaan hak di dalam hukum, serta persamaan hak untuk rekrutmen politik. Adanya persamaan hak di dalam partisipasi berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam politik tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Adanya persamaan hak di hadapan hukum mensyaratkan hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, etnik, agama, status sosial, ekonomi, maupun jabatan politik. Persamaan hak untuk rekrutmen politik berarti terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menjadi pejabat publik yang dipilih berdasarkan prestasi atau kinerja, bukannya berdasarkan status yang diberikan seperti penunjukan pemimpin berdasarkan keturunan.

Kapasitas sistem politik menurut Pye memiliki tiga aspek. *Pertama*, kapasitas berarti kemampuan suatu sistem politik untuk menunjukkan prestasi atau kinerja yang mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial suatu bangsa. *Kedua*, kapasitas berarti juga kemampuan suatu bangsa untuk secara efisien dan efektif melaksanakan kebijakan publik. Negara yang memiliki kapasitas lebih besar adalah negara yang mampu menjalankan kebijakan yang sama dengan lebih cepat dan lebih baik. *Ketiga*, kapasitas juga berarti kemampuan untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara rasional. Menurut Pye, pemerintahan modern tidak boleh menjalankan administrasi berdasarkan gagasan dan kepentingan yang irasional.

Karakteristik yang *ketiga*, yaitu diferensiasi dan spesialisasi sangat terkait dengan institusionalisasi politik. Diferensiasi dan spesialisasi di dalam struktur dan lembaga politik berarti bahwa terdapat pembagian kerja antara lembaga-lembaga politik sehingga setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dan terbatas. Lebih dari itu, diferensiasi dan spesialisasi juga mengisyaratkan pembagian kerja antarlembaga politik mengarah kepada integrasi fungsi. Meskipun lembaga-lembaga politik menjalankan fungsi yang



berbeda-beda, namun secara keseluruhan setiap lembaga berkontribusi menjalankan fungsi negara.

Huntington, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya lebih cenderung membagi arah pembangunan politik ke dalam empat karakter, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokrasi, dan partisipasi (mobilisasi). **Rasionalisasi** yang dimaksudkan oleh Huntington memerlukan perubahan dari partikularisme ke universalisme, dari tumpang-tindih wewenang ke spesialisasi, dari askripsi ke prestasi, serta dari kecenderungan dan keberpihakan pada satu kelompok, agama atau ideologi ke arah netralitas. **Integrasi nasional** menuntut setiap bangsa untuk meminimalkan persaingan politik berdasarkan etnis dan mulai membangun bangsa berdasarkan identitas bersama. Krisis identitas bangsa harus diatasi dengan *nation-building* atau pembangunan karakter bangsa. **Demokrasi** yang dimaksudkan Huntington mencakup nilai-nilai pluralisme, persaingan sehat antarkelompok politik, serta perimbangan kekuasaan. **Mobilisasi** dalam konteks pembangunan politik dalam pandangan Huntington menyangkut mobilisasi masyarakat, dalam arti perubahan sosial yang dapat memengaruhi perubahan politik. Misalnya adalah pendidikan, urbanisasi, keterbukaan media massa, industrialisasi, perluasan pelayanan publik, peningkatan kapasitas pemerintah, pergeseran perhatian politik masyarakat dari masalah lokal ke masalah nasional, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi dari pembangunan politik. Pembangunan politik dapat dikatakan sebagai perubahan politik terencana dari suatu kondisi awal tertentu ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dan melibatkan seluruh bagian dari masyarakatnya. Komponen dari definisi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dilakukan suatu perubahan politik.
2. Perubahan politik tersebut terencana.
3. Pemerintah merencanakan perubahan tersebut.
4. Pelaksanaannya melibatkan dan menyangkut seluruh masyarakat.
5. Perubahan dilakukan dari suatu kondisi awal (sering disebut tradisional) ke arah kondisi baru (sering disebut modern).

Penjelasan konsep pembangunan politik di atas menginformasikan kepada kita ruang lingkup dari pembangunan politik. Pembahasan tentang pembangunan politik di dalam buku ini akan mencakup konsep-konsep penting yang disinggung di atas, seperti modernisasi politik, pembangunan

karakter bangsa, pembangunan institusi negara, integrasi nasional, pembangunan budaya politik, demokratisasi, dan *civil society* atau masyarakat madani.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hubungan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi dan sosial!
- 2) Jelaskanlah pengertian dari pembangunan politik!
- 3) Apa yang ingin dicapai oleh sebuah proses pembangunan politik?
- 4) Apa saja kritik terhadap konsep pembangunan politik?
- 5) Jelaskan arah pembangunan politik menurut Samuel P. Huntington!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pembangunan politik sangat terkait dengan dan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Kemunculan konsep pembangunan politik sendiri merupakan reaksi dari kebutuhan akan sebutan pada jenis pembangunan masyarakat yang dilakukan di luar aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan politik sering dianggap sebagai dampak dari pembangunan ekonomi, di mana masyarakat yang semakin maju akan membutuhkan sistem politik yang semakin baik. Dalam perkembangannya pembangunan politik juga dianggap sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi dipandang hanya dapat dijalankan dengan baik jika sistem politiknya menunjukkan kapasitas yang baik.
- 2) Pembangunan politik adalah suatu proses perubahan politik terencana dari suatu kondisi ke kondisi politik lainnya yang dilakukan oleh suatu pemerintah serta melibatkan dan menyangkut seluruh masyarakatnya.
- 3) Pembangunan politik dilakukan untuk mencapai kebajikan bersama (*common good*). Di dalam membina kehidupan bersama suatu bangsa, apa yang dianggap sebagai kebajikan bersama umumnya terkait dengan kebebasan, kesejahteraan, keamanan, keadilan, persamaan, dan kebahagiaan.
- 4) Kritik terhadap konsep pembangunan politik dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang *pertama* adalah universalitas atau keberlakuan universal konsep pembangunan politik. Konsep ini dinilai

bias Barat karena muncul di Barat dan menggunakan indikator modernitas Barat. Oleh karena itu, keberlakuannya di negara-negara berkembang diragukan. Yang *kedua* adalah keterukuran konsep pembangunan politik. Karena luasnya ketercakupan pembangunan politik maka ukuran yang dikembangkan untuk mengatakan suatu pembangunan politik berhasil dilaksanakan menjadi sangat banyak dan luas sehingga sulit untuk diukur. Semakin banyak ilmuwan politik yang memilih untuk fokus pada salah satu aspek dari pembangunan politik daripada mengukur pembangunan politik itu sendiri.

- 5) Menurut Huntington, pembangunan politik umumnya dilakukan untuk mewujudkan rasionalisasi, integrasi nasional, demokratisasi, dan partisipasi. (Anda bisa mengembangkan sendiri jawaban ini).



## RANGKUMAN

---

Seiring dengan berkembangnya wacana studi tentang pembangunan, muncul konsep pembangunan politik berdasarkan kebutuhan atas suatu konsep yang merepresentasikan pembangunan di bidang politik. Yang dimaksud dengan pembangunan politik adalah suatu proses perubahan politik dari suatu kondisi awal ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu bangsa serta melibatkan dan menyangkut seluruh bagian dari masyarakatnya. Konsep ini dikritik aplikabilitasnya karena kurang berlaku umum dan terlalu luas cakupannya. Masalah-masalah yang dibahas di dalam pembangunan politik sangat banyak, termasuk konflik etnis, mobilisasi masyarakat, demokratisasi, radikalisme, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).



## TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Konsep pembangunan politik muncul dari kebutuhan akan suatu konstruk untuk merefleksikan ....
- perubahan politik secara terencana
  - dinamika politik
  - modernisasi politik
  - pembangunan masyarakat

- 2) Hubungan pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut, *kecuali* ....
- A. pembangunan politik merupakan konsekuensi logis dari pembangunan ekonomi
  - B. pembangunan politik merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi
  - C. pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan ekonomi
  - D. pembangunan politik sangat terkait dan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi
- 3) Karakteristik pembangunan politik menurut Lucian W. Pye adalah ....
- A. adanya diferensiasi
  - B. adanya kesetaraan
  - C. adanya pembangunan kapasitas sistem politik
  - D. semua jawaban benar
- 4) Karakteristik pembangunan politik menurut Samuel P. Huntington adalah ....
- A. persamaan, kedaulatan, kebebasan, keadilan, dan kebahagiaan
  - B. rasionalisasi, integrasi nasional, demokratisasi, dan partisipasi
  - C. kesejahteraan, keamanan, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan
  - D. partisipasi, kontestasi dan jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia
- 5) Definisi dari pembangunan politik adalah sebagai berikut, *kecuali* ....
- A. adanya perubahan politik yang dilakukan secara terencana
  - B. perubahan politik yang dilakukan oleh pemerintah
  - C. perubahan politik yang dilakukan untuk masyarakat
  - D. adanya perubahan politik, baik ke arah lebih baik, maupun lebih buruk
- 6) Yang dimaksud dengan kesetaraan oleh Lucian W. Pye adalah kesamaan hak untuk ....
- A. dipilih, hak memilih, dan kesamaan di hadapan hukum
  - B. memperoleh pekerjaan yang layak atas kemanusiaan
  - C. memiliki agama dan menjalankan kepercayaan
  - D. membela negara dan hak atas pendidikan
- 7) Yang dimaksud dengan diferensiasi adalah ....
- A. mengakui dan menerima perbedaan di dalam masyarakat
  - B. ada perbedaan di antara kelompok-kelompok masyarakat di dalam suatu negara

- C. terdapat diferensiasi dan spesialisasi fungsi dan kewenangan di antara lembaga-lembaga negara, namun membentuk suatu fungsi yang terintegrasi
  - D. terdapat ekspansi struktur kelembagaan suatu negara untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat
- 8) Kapasitas sistem politik menurut Pye mencakup kemampuan untuk ....
- A. memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu bangsa untuk membangun negara
  - B. menunjukkan kinerja, efisiensi dan efektivitas, serta kemampuan menjalankan administrasi secara rasional
  - C. menyatukan seluruh masyarakat dan menggerakkan untuk menjalankan pembangunan
  - D. menjaga legitimasi di dalam negeri maupun memelihara citra positif di tingkat internasional
- 9) Mobilisasi menurut Huntington terkait dengan ....
- A. keikutsertaan masyarakat di dalam pemilihan umum
  - B. pelibatan masyarakat di dalam pembangunan baik infrastruktur maupun perilaku politik
  - C. keterlibatan masyarakat di dalam proses pembuatan keputusan politik
  - D. perubahan di dalam masyarakat yang mengakibatkan perubahan penting di dalam politik
- 10) Integrasi nasional sangat penting untuk dicapai oleh setiap bangsa karena ....
- A. kebanyakan negara terdiri dari berbagai kelompok masyarakat berdasarkan etnis, agama, dan/atau ideologi yang berbeda-beda
  - B. setiap kelompok yang ada di dalam masyarakat suatu negara menuntut persamaan hak di dalam politik dan ekonomi
  - C. terdapat potensi konflik di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik
  - D. semua jawaban di atas benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Teori Pembangunan Politik

Teori merupakan sebuah pernyataan ilmiah tentang hubungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Ini berarti bahwa yang *pertama*, teori merupakan sebuah kesimpulan yang diambil berdasarkan sebuah studi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah metodologi tertentu. Yang *kedua*, teori berusaha menjelaskan hubungan antara satu peristiwa atau gejala dengan peristiwa atau gejala lainnya. Dengan demikian, teori berbeda dengan konsep. Teori lebih luas daripada sekedar definisi tentang konsep-konsep tertentu karena teori menjelaskan hubungan antara gejala-gejala sosial dan politik yang direpresentasikan oleh konsep-konsep secara individual. Teori bisa jadi merupakan penjelasan hubungan antara konsep-konsep.

Wujud dari penjelasan teoretis atas hubungan antarvariabel dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Yang *pertama* adalah hubungan linear yang menjelaskan kausalitas ataupun korelasional antara satu variabel dengan lainnya. Hubungan korelasional yang dimaksud adalah bahwa perubahan pada variabel tertentu diiringi oleh perubahan variabel lainnya, namun tidak berarti ada hubungan sebab-akibat di antara keduanya. Misalnya teori tentang hubungan linier antara pembangunan ekonomi dengan demokrasi yang diusung oleh Seymour Martin Lipset. Teori ini menjelaskan adanya hubungan korelasional antara kemajuan ekonomi suatu bangsa dengan demokrasi. Semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi suatu bangsa, semakin tinggi partisipasi dan kebebasan politik masyarakatnya.

Pada sejumlah negara Barat yang menjadi subjek penelitian Lipset pada tahun 1950-an tampaknya korelasi antara pembangunan ekonomi dan tingkat partisipasi tersebut memang ada. Di negara-negara di mana tingkat kesejahteraan ekonominya baik, tingkat partisipasi politiknya juga tinggi. Hal ini terjadi menurut Lipset karena ketika kebutuhan primer warga negara telah terpenuhi, perhatian warga negara tidak lagi terfokus pada usaha memenuhi kebutuhan primer, tetapi teralihkan kepada masalah-masalah umum seperti politik dan pemerintahan.

Kategori yang *kedua* adalah matriks tipologi yang mengklasifikasi berbagai perilaku atau keputusan politik berdasarkan variasi-variasi indikatornya. Misalnya adalah tipe-tipe transisi demokrasi berdasarkan indikator siapa inisiatornya dalam politik domestik dan bagaimana proses

transisi tersebut dilakukan. Menurut Terry Karl, terdapat empat jenis transisi berdasarkan indikator-indikator tersebut. Keempat jenis transisi yang dimaksud adalah pakta, inisiasi, reformasi, dan revolusi. Keempat jenis transisi tersebut dibedakan berdasarkan siapa yang mendorong transisi, apakah penguasa atau oposisi dalam politik domestik; dan bagaimana proses transisi berlangsung, apakah berlangsung secara damai atau konfliktual.

Dalam praktiknya, proses demokratisasi di berbagai negara memang mengambil jalur transisi yang bervariasi. Di Indonesia pada tahun 1998 terjadi proses demokratisasi melalui jalur reformasi. Demokratisasi diawali dengan meningkatnya tuntutan warga negara atas perubahan dari sistem politik yang cenderung otoriter. Transisi tersebut berlangsung secara damai dan memperlihatkan akomodasi oleh rezim penguasa terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat.

Di Thailand pada tahun 1977, demokratisasi yang berlangsung mengambil jalur inisiasi. Militer melakukan kudeta atas pemerintahan sipil yang dianggap telah gagal menjalankan pemerintahan. Namun bukannya pemerintahan militer yang otoriter yang berlangsung, militer justru kemudian mengambil inisiatif untuk mengaplikasikan model pemerintahan demokratis dengan dibuatnya konstitusi dan struktur pemerintahan yang demokratis.

Jalur transisi yang disebut sebagai pakta terjadi ketika perubahan ke arah demokrasi dihasilkan oleh kesepakatan antara elit yang berkuasa dengan masyarakatnya. Jadi, ketika pemerintah memiliki niat baik untuk melakukan perubahan ke arah demokratisasi, sementara pada saat yang bersamaan di dalam masyarakat juga telah berkembang aspirasi perubahan agar sistem pemerintahan lebih mengakomodasi partisipasi, kontestasi, dan hak-hak politik warga negara.

Revolusi terjadi ketika demokratisasi terjadi atas desakan dari masyarakat yang memaksa terjadinya pergantian rezim dari otoriter dialihkan kepada rezim baru yang lebih demokratis. Misalnya yang terjadi di Timur Tengah yang sering disebut sebagai “*Arab Spring*” oleh media massa. Rezim Mubarak di Mesir dan Khadafi di Libya dijatuhkan melalui proses revolusi. Di Libya bahkan prosesnya melibatkan perang yang dibantu oleh pasukan multinasional, termasuk dari Perancis dan Jerman. Rezim otoriter sebelumnya kemudian digantikan oleh rezim baru yang dianggap akan lebih demokratis.

Kategori yang ketiga adalah teori-teori yang menggambarkan hubungan antara banyak (lebih dari dua) variabel yang dapat berupa hubungan sekuensial (tahap-tahap dalam suatu proses) maupun gradual (tahap-tahap



peningkatan/perubahan). Kelompok teori ini umumnya berupaya untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang kompleks secara menyeluruh. Contohnya adalah teori sistem politik yang dianjurkan oleh David Easton.

Teori sistem politik yang digagas oleh Easton mencoba mengajukan aplikasi konsep sistem ke dalam analisis politik. Proses politik yang berlangsung sirkuler dalam pandangan Easton dapat dianalogikan sebagai suatu sistem. Proses tersebut dimulai dari masukan terhadap kebijakan, proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, lalu kemudian kembali menjadi *input* kebijakan berikutnya. Konsep sistem sendiri pada awalnya lebih banyak digunakan dalam ilmu biologi dan diartikan sebagai suatu kesatuan dari unit-unit yang memiliki fungsi masing-masing, kemudian unit-unit tersebut saling berhubungan hingga membentuk suatu fungsi yang berbeda. Fungsi-fungsi yang dibayangkan ada di dalam sistem politik menurut Easton adalah fungsi *input* kebijakan, proses pembuatan kebijakan, *output* kebijakan, hingga *feedback* atau masukan kembali untuk perbaikan atau perubahan kebijakan.

Teori-teori tentang pembangunan politik sangat bervariasi mulai dari yang sederhana hingga yang komprehensif. Beberapa ilmuwan berusaha untuk menjelaskan pembangunan politik secara komprehensif berdasarkan pengalaman negara-negara Barat, seperti misalnya Rustow dan Organski. Kedua ilmuwan tersebut berusaha menjelaskan tentang tahap-tahap pembangunan politik yang telah dilaksanakan di negara-negara Barat yang memiliki sistem politik yang lebih modern dibandingkan negara-negara lainnya.

Teori pembangunan politik di dalam perkembangannya dinilai belum mencapai hasil akhir yang memuaskan. S.P. Varma (1975) berpendapat bahwa meskipun perkembangan teorisasi tentang pembangunan politik dapat diidentifikasi dalam wacana ilmu politik, namun penjelasan yang dihasilkan masih belum memuaskan banyak ilmuwan.

Perkembangan teori pembangunan politik, menurut S.P. Varma, berlangsung dalam tiga tahap. Tahap *pertama* dalam proses pencarian teori pembangunan politik adalah usaha-usaha untuk menjelaskan hal-hal mendasar yang bersifat infrastrukturnal terhadap pembangunan politik. Misalnya adalah studi Pye tentang perbedaan budaya politik di negara-negara Barat yang sudah maju dengan negara-negara berkembang. Demikian juga halnya dengan studi Rustow tentang tahap-tahap pembangunan politik yang lebih banyak terfokus

pada kemajuan ekonomi masyarakat sebagai prasyarat kemajuan politik. Pada prinsipnya, di tahap *pertama* ini, umumnya teori pembangunan politik berusaha menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan politik, seperti budaya politik, ekonomi, dan sosial.

Tahap *kedua*, menurut S.P. Varma, mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an. Studi pembangunan politik mulai beralih dari studi infrastruktural ke arah studi tentang aktor dan institusi yang melaksanakan pembangunan politik. Pada tahap ini para ilmuwan politik telah menyadari bahwa pembangunan politik merupakan suatu proses yang terjadi secara berkesinambungan, bukan merupakan suatu hasil akhir. Kemampuan dan kemauan aktor dan institusi politik untuk menangani perubahan politik ini menjadi sangat penting. Fokus studi pembangunan politik lebih diarahkan pada kemampuan (*capacity*) dan kemauan (*will*) dari aktor serta efisiensi dan efektivitas institusi politik dalam menjalankan pembangunan politik.

Pada tahap yang ketiga, para ilmuwan politik cenderung untuk memfokuskan studi pembangunan politik pada perilaku politik (*political behavior*), proses sosial, dan perbandingan perubahan. Berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya yang mempelajari perubahan pada sistem, struktur, dan institusi politik, pada tahap ini perilaku individu dianggap sebagai bagian penting dari perubahan politik. Misalnya adalah studi partisipasi politik yang dilakukan oleh Huntington. Implikasinya, studi sejarah cenderung diabaikan dan kuantifikasi pola-pola interaksi sosial dalam isu politik lebih diperhatikan. Ilmuwan yang karya-karyanya digolongkan dalam tahap ini adalah Daniel Lerner, Karl Deutsch, Samuel Huntington, Leonard Binder, Gabriel Almond, serta Robert Bruner dan Garry Brewer.

Dalam pandangan S.P. Varma, ada tiga kelompok teori dalam tahap yang ketiga ini, yaitu teori perubahan komponen, teori perubahan krisis (perubahan keseimbangan), dan teori perubahan kompleks. Teori perubahan komponen berusaha untuk menjelaskan variabel-variabel perubahan, dari variabel independen (faktor yang memengaruhi perubahan) sampai variabel dependen (hasil perubahan). Variabel-variabel tersebut disebut sebagai komponen perubahan. Huntington berpendapat bahwa komponen-komponen perubahan adalah budaya, struktur sosial dan politik, golongan atau kelompok sosial, kepemimpinan dan kebijakan politik. Tiap-tiap komponen tersebut diukur berdasarkan skala kekuatan dan kecepatannya.

Contoh dari perubahan komponen dapat dilihat dalam perbandingan kasus perubahan politik di Indonesia dan Korea Selatan pasca kemerdekaan masing-

masing, yaitu 1945 dan 1948. Dalam waktu 20 tahun kemerdekaannya, bangsa Indonesia mengalami kesulitan untuk keluar dari krisis politik yang berlangsung. Eksperimentasi demokrasi parlementer berakhir dengan kekecewaan di pihak Soekarno dan militer yang diakhiri dengan diaplikasikannya demokrasi terpimpin. Budaya politik demokratis masih belum tertanam dengan baik di kalangan politisi saat itu. Sementara itu pemerintah sulit membuat kebijakan yang bisa disepakati bersama dan didukung kuat oleh parlemen. Masa demokrasi terpimpin yang dicirikan dengan eksekutif yang kuat pun tidak berhasil membuat kebijakan ekonomi yang tepat sehingga kepemimpinan Soekarno ditutup dengan krisis ekonomi dan krisis politik yang melahirkan Orde Baru.

Korea Selatan tidak lebih baik dari Indonesia dalam hal eksperimentasi demokrasi. Secara institusional, Korea Selatan menerapkan demokrasi karena berada dalam bimbingan Amerika Serikat (AS) setelah Perang Dunia II untuk persiapan kemerdekaan. Kesulitan mencapai konsensus tentang sistem politik yang ingin diadopsi di kalangan elit politik Korea Selatan, AS menyerahkan sepenuhnya institusionalisasi di Korea Selatan kepada pilihan-pilihan bangsa Korea Selatan sendiri. Meskipun memiliki institusi demokrasi, namun dalam 20 tahun pertama pemerintahannya, Korea Selatan merupakan pemerintahan otoriter. Masyarakat sipilnya memiliki budaya partisipatif yang kuat sehingga banyak terjadi aksi protes terhadap pemerintahan otoriternya. Namun dengan bermodalkan hasil pembangunan ekonomi yang terbilang sukses dan militer yang keras, pemerintahan otoriter di Korea Selatan bertahan hingga lebih dari 40 tahun. Pembangunan ekonomi di Korea Selatan tidak berlangsung secara berimbang karena pemerintah cenderung untuk mengutamakan dukungan kepada kelompok Chaebol (konglomerat, pengusaha besar) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonominya sehingga usaha kecil dan menengah agak tertinggal dan sulit berkembang. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara golongan kaya dan miskin di negara tersebut. Para pemimpin politik dari militer memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan masing-masing memiliki pendukung yang besar. Koalisi yang terbentuk antarpemimpin politik lah yang biasanya menentukan siapa yang akan memimpin lembaga eksekutif untuk satu periode.

Teori perubahan komponen memperlihatkan perbedaan di antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan, tentang struktur sosial, struktur politik, budaya politik, golongan/kelompok sosial, kepemimpinan dan

kebijakan publik. Tiap komponen yang dipelajari pada setiap negara menunjukkan tingkat kecepatan dan kekuatan perubahan yang berbeda.

Teori perubahan krisis yang diusulkan oleh Almond dan Rustow menyimpulkan adanya perubahan dalam keseimbangan di dalam sistem politik. Teori ini mengasumsikan adanya suatu keseimbangan awal (*antecedental equilibrium*) yang karena variabel perilaku, kepemimpinan, dan kebijakan politik dapat berubah serta membentuk suatu equilibrium yang baru (*consequential equilibrium*). Misalnya perubahan politik yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Keseimbangan awal yang diciptakan oleh Khadafi selama beberapa puluh tahun akhirnya mengalami perubahan sejak adanya tuntutan-tuntutan dari oposisi untuk demokratisasi dan perubahan rezim. Variabel yang memengaruhi perubahan tersebut adalah tuntutan yang besar dan kuat dari oposisi serta dukungan persenjataan dan militer dari negara-negara Barat, seperti Perancis dan Jerman. Setelah beberapa bulan peperangan antara pendukung Khadafi dan oposisi yang didukung Barat, akhirnya kelompok oposisi dapat memaksakan suatu equilibrium baru yang anti Khadafi. Seberapa jauh demokrasi dapat diaplikasikan memang masih belum dapat dilihat, namun perubahan struktur politik jelas telah terjadi akibat dari gerakan oposisi dan dukungan luar negeri.

Teori perubahan kompleks berupaya membahas variabel-variabel penyebab perubahan politik atau model pembangunan politik secara komprehensif. Brunner dan Brewer misalnya mencoba menjelaskan 22 variabel di bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta hubungannya yang kompleks dengan perubahan politik. Hubungan-hubungan tersebut dirumuskan dalam 12 persamaan (*equation*). Melalui studi ini, Brunner dan Brewer mencoba menawarkan alternatif cara-cara melakukan perubahan politik di berbagai sektor kepada para pemimpin politik dan pejabat pemerintahan. Teori yang menekankan kepada perhitungan kuantitatif terhadap faktor-faktor penyebab perubahan politik ini memberikan gambaran terperinci tentang variabel-variabel pembangunan politik yang bisa diukur dengan berbagai indikator.

Jan Erik Lane dan Svante Ersson (1994) mendemonstrasikan contoh aplikasi teori perubahan kompleks ini dalam lima aspek pembangunan politik. Kelima aspek tersebut adalah pembangunan demokrasi, kapasitas, institusionalisasi, stabilitas, dan orientasi radikal. Variabel-variabel yang diuraikan dari kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan demokrasi
  - a. Skor atau angka demokrasi.
  - b. Hak-hak asasi manusia.
  - c. Peran politik pihak militer.
  - d. Pluralisme atau fraksionalisasi sistem kepartaian.
  - e. Fungsi-fungsi sistem kepartaian.
2. Kapasitas
  - a. Konsumsi pemerintah.
  - b. Belanja pemerintah pusat.
  - c. Belanja militer dan personalia militer.
  - d. Keterlibatan dalam perang setelah Perang Dunia II.
3. Institusionalisasi
  - a. Sklerosa (kelembaman) institusional.
  - b. Usia kepemimpinan modern.
  - c. Pengaruh kepemimpinan modern.
  - d. Status negara.
4. Stabilitas
  - a. Kemelut politik.
  - b. Tindakan kekerasan.
  - c. Gelombang demonstrasi.
5. Orientasi radikal
  - a. Kekuatan kaum kiri.
  - b. Peranan kaum kiri di dalam pemerintahan.

Studi yang dilakukan oleh Lane dan Ersson terhadap 70 negara secara umum menggambarkan dua kesimpulan utama. *Pertama*, variasi-variasi antarnegara dalam skor setiap indikatornya tidak menunjukkan pola yang dapat membantu menyusun kategorisasi negara berdasarkan indikator pembangunan politiknya. Jadi, tiap negara bisa berbeda-beda variabel pembangunan politiknya dan karakter sistem politiknya. *Kedua*, variasi antara negara-negara dalam melakukan pembangunan politiknya sangat besar. Artinya, umumnya negara membangun sistem politiknya dengan karakter masing-masing sehingga suatu model pembangunan politik yang universal tidak ditemukan. Kebijakan pembangunan politik antarsatu negara dengan lainnya bisa berbeda 180 derajat, meskipun umumnya negara memiliki kepentingan nasional yang sama, yaitu mensejahterakan dan menjamin keamanan warga negaranya.

Kelima aspek yang dijadikan variabel untuk menilai proses pembangunan politik sekaligus melengkapi diskusi kita tentang teori pembangunan politik. Pada bagian sebelumnya di dalam modul ini telah disebutkan aspek-aspek pembangunan politik menurut beberapa ilmuwan politik, seperti Pye dan Huntington. Aspek-aspek tersebut merupakan kategori-kategori dari banyak indikator perubahan politik yang dilakukan. Aspek-aspek tersebut disebut juga sebagai dimensi-dimensi pembangunan politik. Dimensi-dimensi pembangunan politik menurut Pye adalah kesetaraan (*equality*), kapasitas sistem politik (*capacity*), dan diferensiasi (*differentialization and specialization*). Sementara itu, menurut Huntington, dimensi-dimensi pembangunan politik meliputi rasionalisasi, integrasi nasional, demokrasi, dan partisipasi (mobilisasi).

Lane dan Ersson di lain pihak menambahkan dimensi orientasi radikal dari pemerintahan dan masyarakatnya sebagai variabel penting di dalam pembangunan politik. Orientasi radikal dari elit-elit di dalam pemerintahan menjadi indikasi penting dari jaminan kebebasan dan kesetaraan politik. Sementara orientasi radikal dari warga negara menjadi indikasi penting kestabilan dan legitimasi politik yang dibangun oleh pemerintah. Meski sangat terkait dengan dimensi lainnya, namun analisis tentang orientasi radikal secara tersendiri dapat memberikan gambaran pluralisme, ancaman kestabilan, dan legitimasi atau delegitimasi pemerintah yang berkuasa. Ketika kaum kiri mendapatkan tempat di dalam pemerintahan, terutama bagi masyarakat Barat, hal itu mengindikasikan keterbukaan kaum konservatif terhadap jaminan kebebasan dan pluralisme di dalam pemerintahan.

Meskipun di dalam uraian di atas dikemukakan bahwa studi pembangunan politik mengalami evolusi dalam tiga tahap perkembangan, namun tidak berarti bahwa tidak terdapat perkembangan terbaru yang memiliki karakteristik berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Perkembangan yang dapat dikategorikan sebagai tahap keempat untuk menambah kategorisasi S.P. Varma ini dipengaruhi oleh perkembangan teori ketergantungan, neoliberalisme, dan regionalisme. Para ilmuwan penganut teori ketergantungan berpandangan bahwa pembangunan politik di negara berkembang dipengaruhi oleh struktur pembagian kerja internasional (*international division of labor*). Dalam pembagian kerja tersebut, negara-negara yang disebut negara pinggiran memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara Barat dalam ekonomi dan politik. Karena ketergantungan ekonomi dan politik tersebut negara-negara berkembang memprioritaskan

kestabilan ekonomi, politik, dan memelihara upah buruh yang rendah, sesuai dengan struktur pembagian kerjanya. Struktur ini lebih menguntungkan negara Barat, sementara pembangunan politik di negara berkembang mengalami pembusukan.

Neoliberalisme kurang sependapat dengan pandangan teori ketergantungan dalam hal perdagangan internasional. Bagi kalangan neoliberal, perdagangan bebas di antara negara-negara terlepas dari persoalan strata ekonominya apakah negara itu maju atau berkembang akan saling menguntungkan bagi semua. Perdagangan bebas, baik di pasar komoditi, tenaga kerja, maupun pasar uang, dapat memacu pertumbuhan suatu negara meskipun ada kehilangan pemasukan pajak ekspor-impor. Nilai pertumbuhan yang terpacu umumnya lebih besar daripada nilai pemasukan pajak yang hilang akibat liberalisasi perdagangan. Oleh karena itu, kalangan neoliberal menganjurkan setiap negara untuk membuat kebijakan membuka ekonominya terhadap perdagangan dan investasi luar negeri. Kebijakan pro-liberalisasi akan memengaruhi perlindungan terhadap industri luar negeri dan tingkat persaingan politik di dalam suatu sistem politik.

Regionalisme merupakan suatu fenomena berpadunya negara-negara suatu kawasan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian politik, ekonomi atau keamanan yang menguntungkan kelompoknya. Integrasi regional ini umumnya muncul sebagai suatu reaksi kolektif negara-negara satu kawasan terhadap perkembangan ekonomi, politik, atau keamanan yang terjadi di sekitarnya dan memberikan dampak terhadap keamanan dan ekonomi di kawasan tersebut. Wacana integrasi regional ini mulai marak mengemuka di tahun 1990-an, ketika terjadi proliferasi pembuatan kesepakatan-kesepakatan kerja sama regional, terutama dalam perjanjian kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreements, FTAs). Seiring dengan berlangsungnya globalisasi, luasnya penerimaan terhadap gagasan neoliberalisme, integrasi regional menjadi semakin populer sebagai suatu mekanisme pertahanan dalam persaingan ekonomi global. Kebijakan untuk mendukung integrasi ekonomi regional sejalan dengan gagasan neoliberal seperti disebutkan di atas.

Perkembangan globalisasi dan regionalisasi dalam beberapa dekade terakhir telah membuat sejumlah negara semakin terbuka terhadap perdagangan internasional dan investasi asing. Secara paralel, konstelasi politik dalam negeri lebih menguntungkan aktor-aktor politik yang pro kepada kebijakan liberal dibandingkan nasionalis. Di hampir semua negara berkembang yang aktif dalam mempromosikan integrasi regional kelompok

liberalis telah menggeser pengaruh kelompok nasionalis. Kebijakan sosialis dan nasionalis yang lebih pro kepada industri kecil dan menengah di dalam negeri seringkali harus berhadapan secara diametral dengan kebijakan neoliberal.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah apa yang dimaksud dengan teori? Apa pula yang dimaksud dengan teori pembangunan politik?
- 2) Jelaskan macam-macam wujud penjelasan teoretis atas hubungan antarvariabel di dalam ilmu politik!
- 3) Dalam sejarah perkembangan teori pembangunan politik, menurut S.P. Varma terdapat tiga tahap perkembangan. Jelaskanlah ketiga tahap perkembangan teori pembangunan politik!
- 4) Sebutkan dan jelaskan tiga macam teori pembangunan politik!
- 5) Sebutkan dimensi-dimensi pembangunan politik menurut Pye, Huntington, serta Lane dan Ersson!

### *Petunjuk jawaban latihan*

- 1) Teori adalah suatu pernyataan ilmiah yang menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Sebuah teori politik berusaha untuk menjelaskan hubungan antara peristiwa atau perilaku politik tertentu dengan peristiwa atau perilaku politik lainnya. Teori pembangunan politik juga merupakan suatu penjelasan ilmiah atas hubungan antara berbagai peristiwa dan perilaku politik yang terkait dengan upaya melakukan perubahan terhadap suatu entitas politik, baik secara institusional maupun behavioral.
- 2) Jenis teori politik ada tiga macam, yaitu (1) teori yang menjelaskan hubungan linear (kausal atau korelasional) antara suatu gejala politik dengan gejala politik lainnya; (2) teori yang menjelaskan hubungan antara beberapa gejala politik dengan beberapa gejala politik lainnya yang membentuk tipologi atau klasifikasi; dan (3) teori yang menjelaskan



hubungan yang kompleks atau sekuensial antara banyak gejala politik secara komprehensif dan holistik.

- 3) Evolusi teori pembangunan politik menurut S.P. Varma dapat dibagi menjadi tiga tahap. (1) Tahap infrastruktur di mana fokus teori lebih pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan politik; (2) Tahap aktor dan institusi, di mana fokus teori lebih pada keinginan dan kemampuan aktor serta efektivitas dan efisiensi institusi dalam melakukan perubahan politik; dan (3) Tahap perilaku di mana fokus teori lebih pada kuantifikasi perilaku elit dan masyarakat di dalam politik.
- 4) Teori pembangunan politik dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) teori komponensial, (2) teori krisis, dan (3) teori kompleks. Teori komponensial berusaha menjelaskan komponen-komponen di dalam pembangunan politik, seperti budaya politik, struktur sosial dan politik, kelompok sosial, kepemimpinan dan kebijakan politik. Teori krisis mengandaikan terjadinya krisis yang mengganggu keseimbangan sehingga perlu dibangun suatu sistem keseimbangan baru. Teori kompleks berusaha menjelaskan dimensi-dimensi di dalam pembangunan politik.
- 5) Menurut Pye, pembangunan politik meliputi tiga dimensi, yaitu kesetaraan, kapasitas, dan diferensiasi. Huntington memandang bahwa pembangunan politik terdiri dari empat dimensi, yaitu demokrasi, rasionalisasi institusi, partisipasi (mobilisasi), dan integrasi nasional. Sedangkan bagi Lane dan Ersson, pembangunan politik meliputi lima dimensi, yaitu pembangunan demokrasi, kapasitas, institusionalisasi, stabilitas, dan orientasi radikal.



## RANGKUMAN

---

Teori pembangunan politik berkembang seiring dengan dinamika ilmu politik. Ilmu politik menurut S.P. Varma mengalami perkembangan dalam tiga tahap. Yang *pertama* adalah tahap infrastruktur, di mana fokus dari studi pembangunan politik adalah tentang infrastruktur apa atau faktor-faktor apa yang memengaruhi pembangunan politik. Tahap yang *kedua* adalah tahap aktor dan institusi, di mana fokus studi pembangunan politik adalah tentang kapasitas dan kemauan aktor untuk melakukan perubahan politik serta efisiensi dan efektivitas institusi dalam mengimplementasikannya. Tahap *ketiga* adalah tahap perilaku, di mana fokus studi pembangunan politik lebih kepada perilaku elit politik dan

warga negaranya yang dilakukan dengan pengukuran yang dikuantifikasi dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

Studi pembangunan politik lebih lanjut sangat dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi sejak tahun 1970-an. Fokus pada faktor-faktor domestik mulai bergeser karena faktor-faktor internasional mulai sering dipertimbangkan memengaruhi atau bahkan membentuk strategi pembangunan politik domestik. Faktor internasional yang dimaksud adalah masalah ketergantungan ekonomi serta faktor globalisasi dan regionalisasi. Modernisasi institusi politik dinilai tidak selalu menimbulkan kemajuan secara politik, tetapi dalam banyak kasus negara berkembang justru memunculkan situasi ketergantungan ekonomi dan politik pada sistem internasional yang memperumit situasi politik domestik. Sementara itu, dalam era globalisasi dan regionalisasi, negara-negara berkembang dihadapkan pada tekanan untuk melakukan strategi penyesuaian agar dapat bersaing dengan pasar internasional. Ini dapat dikategorikan sebagai tahap yang keempat yang bisa ditambahkan pada evolusi teori pembangunan politik.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut Terry Karl terdapat jenis-jenis transisi politik, *kecuali* ....
  - A. fakta
  - B. inisiasi
  - C. reformasi
  - D. revolusi
  
- 2) Di Indonesia pada tahun 1998 terjadi proses demokratisasi melalui jalur ....
  - A. resolusi
  - B. revolusi
  - C. reformasi
  - D. reformulasi
  
- 3) Proses politik yang berlangsung sirkuler dalam pandangan Easton dapat dianalogikan sebagai ....
  - A. sistem
  - B. sirkulasi
  - C. koalisi
  - D. kolaborasi

- 4) Studi pembangunan politik tahap kedua lebih menekankan kepada kajian tentang ....
  - A. infrastruktur
  - B. pembangunan fisik
  - C. perilaku aktor
  - D. institusi politik
  
- 5) Aspek stabilitas dalam pembangunan politik dalam pandangan Jan Erik Lane dan Svante Ersson adalah ....
  - A. kemelut politik
  - B. tindakan kekerasan
  - C. gelombang demonstrasi
  - D. semua jawaban benar
  
- 6) Teori ketergantungan berpandangan bahwa pembangunan politik di negara berkembang dipengaruhi oleh ....
  - A. struktur pembagian kerja internasional
  - B. pembagian blok Barat dan blok Timur
  - C. munculnya konflik dan kekerasan di negara yang baru merdeka
  - D. pola-pola hubungan diplomasi sebuah negara
  
- 7) Pendorong sejumlah negara semakin terbuka terhadap perdagangan internasional dan investasi asing disebabkan oleh ....
  - A. desentralisasi dan debirokratisasi
  - B. globalisasi dan regionalisasi
  - C. persaingan internasional yang semakin sengit
  - D. perebutan pengaruh Amerika Serikat
  
- 8) Negara yang melaksanakan eksperimen demokrasi dengan bermodalkan hasil pembangunan ekonomi yang terbilang sukses dan militer yang keras adalah ....
  - A. Malaysia
  - B. Thailand
  - C. Indonesia
  - D. Korea Selatan
  
- 9) Ilmuwan yang menyusun teori perkembangan pembangunan politik diklasifikasikan dalam tiga tahap adalah ....
  - A. Samuel P Huntington
  - B. Lucian W Pye
  - C. S.P. Varma
  - D. David Easton

10) Pengertian teori adalah ....

- A. penjelasan hubungan antara konsep-konsep
- B. klasifikasi rumpun keilmuan
- C. pengelompokan pengetahuan
- D. berbagai variabel yang dapat diukur

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Fungsi Pembangunan Politik

Pembangunan politik memiliki beberapa fungsi sekaligus bagi suatu sistem politik. Untuk dapat bertahan dalam sistem internasional atau lebih baik lagi, untuk berkembang maju, pembangunan politik merupakan satu unsur penting bagi pemerintah dan masyarakat suatu negara. Eksistensi Uni Soviet misalnya. Pembangunan politik ke arah pengembangan sistem sosialisme pasca Revolusi Bolshevik 1917 merupakan suatu reaksi yang responsif terhadap ancaman perkembangan politik global dengan semakin majunya Jerman dan Jepang, serta kegagalan mengalahkan Jepang pada Perang Russo-Japanese di tahun 1905.

Keinginan untuk meninggalkan sosialisme Soviet pada tahun 1985 dengan dipromosikannya gagasan *glasnost* dan *perestroika* menjadi titik pangkal perubahan politik selanjutnya menuju sistem baru yang berbeda dari sosialisme. Kegagalan perencanaan terpusat yang diiringi dengan pembukaan keran kebebasan membuat masyarakat dan elit politik melihat perubahan politik sebagai keharusan. Rusia terbentuk seiring dengan pecahnya Soviet menjadi 15 negara. Pembangunan politik yang dijalankan Rusia baru selama 5 tahun krisis ekonomi (1991 – 1995) akhirnya membuahkan hasil positif bagi kemajuan kembali Rusia. Rusia saat ini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global.

Namun yang perlu dicatat adalah kemajuan yang dicapai Rusia baik pada masa pasca Revolusi 1917 maupun pasca pecahnya Soviet diawali dengan situasi yang mendesakkan suatu perubahan politik. Membuat perubahan politik menjadi suatu keharusan demi eksistensi dan kemajuannya. Catatan yang kedua adalah perubahan politik telah memiliki fungsi tertentu bagi kemajuan Rusia di dalam sejarahnya, meskipun berbeda sistemnya, komunisme dan demokrasi.

Perbedaan kultur dan struktur politik membuat jenis tantangan yang dihadapi oleh tiap-tiap negara menjadi beragam pula. Negara-negara yang memiliki budaya politik partisipan lebih banyak dibandingkan budaya politik subjek dan parokialnya menghadapi tantangan yang lebih kompleks di dalam membangun stabilitas dan legitimasinya. Sementara itu, negara yang budaya politik parokial dan subjeknya lebih dominan daripada partisipannya akan

lebih banyak berhadapan dengan tantangan perubahan di tingkat elit-elit strategisnya.

Tujuan akhir dari umumnya pembangunan politik di berbagai negara adalah untuk menciptakan masyarakat yang baik atau apa yang disebut oleh Huntington (1987) sebagai *the good society*. Upaya untuk menciptakan masyarakat yang baik ini dilakukan dengan memperhatikan makna masing-masing kedua kata di dalam frase tersebut. Setiap masyarakat tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dilihat dari struktur sosial, struktur politik, dan budaya politiknya. Sedangkan *the good* atau yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai kebajikan merupakan sebuah konsep yang bahkan lebih tua daripada konsep politik itu sendiri. Kebajikan ini dibayangkan sebagai suatu karakteristik etis dan filosofis yang melekat pada perilaku dan pranata kehidupan manusia (Kingsbury, 2007).

Masyarakat yang baik, meskipun merupakan tujuan dari pembangunan politik, akan tetapi tidak dibayangkan sebagai tujuan akhir kehidupan manusia. Masyarakat yang baik merupakan alat untuk mencapai tujuan kehidupan manusia, atau dengan kata lain sebuah *means to an end*. Para filsuf sering memperdebatkan tujuan kehidupan manusia, seperti keberadaan (Nietze), kebahagiaan (Bentham), kesejahteraan, kebebasan, keadilan, dan lain sebagainya yang dianggap memberikan nilai bagi kehidupan manusia. Konsepsi “masyarakat yang baik” dibayangkan sebagai sebuah mekanisme yang dapat menyediakan koridor bagi setiap manusia untuk mencapai tujuan kehidupannya. Masyarakat yang baik membuat pencapaian keberadaan (pengakuan), kebahagiaan, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan setiap anggotanya memungkinkan. Secara umum pembangunan politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang baik tersebut.

Namun berbeda dengan pemahaman filosofis atas tujuan dari pembangunan politik di atas, di dalam praktiknya pembangunan politik memberikan manfaat yang lebih pragmatis dalam politik daripada filosofis. Aspek filosofis dari tujuan pembangunan politik ini memberikan landasan argumen yang kuat bagi pembangunan politik. Akan tetapi, terdapat aspek pragmatis dari pembangunan politik yang kemudian membedakan model atau pendekatan pembangunan politik ke dalam sejumlah variasinya.

Beberapa fungsi pembangunan politik secara pragmatis setidaknya dapat dikategorisasi ke dalam enam kelompok, yaitu (1) administrasi pemerintahan; (2) jaminan hak dan kebebasan politik individual; (3) pembangunan

masyarakat; (4) legitimasi pemerintahan; (5) stabilitas dan integrasi masyarakat; dan (6) optimalisasi peran negara bagi masyarakat.

Negara memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Baik bagi para penganut paham liberalisme maupun komunisme, negara merupakan institusi yang penting di dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Jika bagi kalangan liberal, negara memiliki peran untuk menjamin kebebasan warga negara untuk beraktivitas memenuhi kebutuhannya maka kalangan komunis memandang negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga negara hingga pada suatu tahap negara tidak dibutuhkan lagi karena karakternya yang eksploitatif, koruptif, dan abusif (cenderung melakukan penyelewengan).

Pembangunan politik memberikan pekerjaan besar bagi negara. Jika mengikuti pembagian dimensi pembangunan politik yang digagas oleh Lane dan Ersson (1994), dengan adanya tugas melakukan pembangunan politik, negara bertanggung jawab membangun demokrasi, institusionalisasi, kemampuan, kestabilan, serta menjamin kebebasan warga negara, termasuk memberikan kebebasan dan kesempatan bagi berkembangnya kelompok ideologi kiri (sosialisme) yang berorientasi radikal.

Secara terminologis, pembangunan politik mengandung makna perubahan terencana yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan masyarakatnya dari suatu kondisi awal tertentu menuju kondisi lainnya. Term “melibatkan masyarakat” di sini memberikan penekanan akan pentingnya pembangunan politik bagi masyarakat, baik untuk terlibat di dalam proses aplikasinya maupun dalam menerima manfaatnya. Pembangunan politik yang ideal diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam menciptakan kestabilan dan integrasi. Sebaliknya, partisipasi masyarakat justru tidak diharapkan berkontribusi terhadap krisis dan konflik.

Di dalam demokrasi perwakilan yang menjadi prinsip pemerintahan di hampir semua negara di dunia saat ini, lembaga perwakilan difungsikan sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan terlembaga. Konflik kepentingan yang ada di dalam masyarakat dilokalisasi dan diwakilkan kepada lembaga perwakilan untuk memutuskan solusi yang adil dan dapat diterima.

Legitimasi merupakan hal yang sangat penting bagi kemampuan bertahan (*survivability*) suatu pemerintahan. Legitimasi dapat kita artikan sebagai pengakuan atas keabsahan kekuasaan. Dasar dari legitimasi bisa formal dan nonformal. Legitimasi formal diperoleh melalui konstitusi, regulasi, dan

pemilu. Sementara legitimasi nonformal diperoleh melalui prestasi atau performa positif di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Pembangunan politik yang dilakukan dengan baik oleh suatu negara dapat berfungsi membantu membangun basis legitimasi formal maupun nonformal. Pembangunan demokrasi dan penataan institusi dapat berfungsi membangun legitimasi formal. Sedangkan prestasi dalam memelihara stabilitas, mengembangkan kapasitas institusi dan aktor politik, serta memelihara integrasi nasional dapat menjadi basis legitimasi nonformal bagi suatu rezim pemerintahan.

Pembangunan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial sangat terkait dengan pembangunan politik. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya di muka, pembangunan politik sering diperdebatkan sebagai prasyarat dari pembangunan ekonomi. Demikian juga sebaliknya, pembangunan ekonomi sebagai prasyarat pembangunan politik. Kita tidak akan menguraikan perdebatan tentang hubungan kausal antara pembangunan ekonomi dan politik. Namun yang penting untuk ditekankan di sini dalam kaitannya dengan fungsi pembangunan politik adalah bahwa pembangunan politik menyiratkan pembentukan sebuah masyarakat yang ideal. Melalui pembangunan politik, dibentuk suatu masyarakat yang memiliki budaya demokratis, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan, keterbukaan, toleransi, dan kemitraan dengan pemerintah.

Fungsi yang terakhir terkait dengan dimensi pembangunan kapasitas sistem politik untuk menghadapi persoalan-persoalan masyarakat. Pembangunan politik seyogianya mampu menghasilkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas eksekutif dan administratif. Kapasitas *good governance* sangat penting untuk dapat memanifestasikan suatu prosedur dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan haknya dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan ekonomi, politik, maupun sosial.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan fungsi pembangunan politik secara pragmatis!
- 2) Jelaskan tujuan akhir dari pembangunan politik!



*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Salah satu fungsi pembangunan politik adalah dalam rangka membangun administrasi pemerintahan. Pembangunan administrasi pemerintahan dimaksudkan untuk membangun tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Fungsi pembangunan politik yang lain adalah menjamin hak dan kebebasan politik individual; membangun masyarakat; menciptakan legitimasi pemerintahan; menjaga stabilitas dan integrasi masyarakat; dan mengoptimalkan peran negara bagi masyarakat. Silakan Anda kembangkan masing-masing *pointers* jawaban tersebut di atas.
- 2) Tujuan akhir pembangunan politik adalah mewujudkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan alat untuk mencapai tujuan kehidupan manusia atau dengan kata lain sebuah *means to an end*. Para filsuf sering memperdebatkan tujuan kehidupan manusia, seperti keberadaan (Nietze), kebahagiaan (Bentham), kesejahteraan, kebebasan, keadilan, dan lain sebagainya yang dianggap memberikan nilai bagi kehidupan manusia. Silakan Anda kolaborasikan petunjuk jawaban tersebut.

**RANGKUMAN**

---

Secara terminologis, pembangunan politik mengandung makna perubahan terencana yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan masyarakatnya dari suatu kondisi awal tertentu menuju kondisi lainnya.

Fungsi pembangunan politik secara pragmatis setidaknya dapat dikategorisasi ke dalam enam kelompok, yaitu (1) administrasi pemerintahan; (2) jaminan hak dan kebebasan politik individual; (3) pembangunan masyarakat; (4) legitimasi pemerintahan; (5) stabilitas dan integrasi masyarakat; dan (6) optimalisasi peran negara bagi masyarakat.

Negara memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Baik bagi para penganut paham liberalisme maupun komunisme, negara merupakan institusi yang penting di dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Jika bagi kalangan liberal, negara memiliki peran untuk menjamin kebebasan warga negara untuk beraktivitas memenuhi kebutuhannya maka kalangan komunis

memandang negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga negara hingga pada suatu tahap negara tidak dibutuhkan lagi karena karakternya yang eksploitatif, koruptif, dan abusif (cenderung melakukan penyelewengan).

Menurut Lane dan Ersson (1994), fungsi pembangunan politik adalah membangun demokrasi, institusionalisasi, kemampuan, kestabilan, serta menjamin kebebasan warga negara, termasuk memberikan kebebasan dan kesempatan bagi berkembangnya kelompok ideologi kiri (sosialisme) yang berorientasi radikal.

Pembangunan politik yang dilakukan dengan baik oleh suatu negara dapat berfungsi membantu membangun basis legitimasi formal maupun nonformal. Pembangunan demokrasi dan penataan institusi dapat berfungsi membangun legitimasi formal. Sedangkan prestasi dalam memelihara stabilitas, mengembangkan kapasitas institusi dan aktor politik, serta memelihara integrasi nasional dapat menjadi basis legitimasi nonformal bagi suatu rezim pemerintahan.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tujuan akhir dari umumnya pembangunan politik di berbagai negara adalah untuk ....
  - A. memajukan pertumbuhan ekonomi
  - B. menaikkan harkat dan martabat bangsa
  - C. menciptakan *the good society*
  - D. mensejahterakan masyarakat umum
  
- 2) Pembangunan politik yang ideal diharapkan dapat ....
  - A. memobilisasi partisipasi masyarakat
  - B. menciptakan kestabilan
  - C. terbangunnya integrasi
  - D. semua jawaban benar
  
- 3) Fungsi lembaga perwakilan di dalam demokrasi perwakilan adalah sebagai ....
  - A. mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan terlembaga
  - B. mempersatu elemen-elemen dalam masyarakat
  - C. perekat perbedaan yang ada
  - D. *miniature civil society*

- 4) Legitimasi formal diperoleh melalui ....
  - A. konstitusi
  - B. regulasi
  - C. pemilu
  - D. semua jawaban benar
  
- 5) Term “melibatkan masyarakat” dalam pembangunan politik memberikan penekanan akan pentingnya pembangunan politik bagi masyarakat, baik untuk terlibat di dalam ....
  - A. proses aplikasinya dan dalam menerima manfaatnya
  - B. konflik dan pergulatan kepentingan
  - C. penyadaran fungsi diri secara individu
  - D. peningkatan karier masing-masing individu
  
- 6) Negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ....
  - A. keamanan
  - B. ketertiban
  - C. kesejahteraan
  - D. semua jawaban benar
  
- 7) Dalam konteks pembangunan politik, negara bertanggung jawab membangun ....
  - A. demokrasi
  - B. institusionalisasi
  - C. kestabilan
  - D. semua jawaban benar
  
- 8) Masyarakat yang memiliki budaya demokratis, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan, keterbukaan, toleransi, dan kemitraan dengan pemerintah merupakan tujuan dari pembangunan ....
  - A. sosial
  - B. politik
  - C. keagamaan
  - D. budaya
  
- 9) *Good governance* merupakan tujuan pembangunan politik dari aspek ....
  - A. administrasi pemerintahan
  - B. demokrasi
  - C. kesejahteraan masyarakat
  - D. pembangunan institusi

- 10) Pembangunan politik di Uni Soviet pasca Revolusi Bolshevik 1917 diarahkan pada ....
- A. integrasi negara-negara bagian Uni Soviet
  - B. kapitalisasi dan liberalisme
  - C. pengembangan sistem sosialisme
  - D. kemerdekaan bangsa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A. Perubahan politik secara terencana.
- 2) C. Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.
- 3) D. Semua jawaban benar.
- 4) B. Rasionalisasi, integrasi nasional, demokratisasi, dan partisipasi.
- 5) D. Adanya perubahan politik, baik ke arah lebih baik, maupun lebih buruk.
- 6) A. Kesamaan hak dipilih, hak memilih, dan kesamaan di hadapan hukum.
- 7) C. Terdapat diferensiasi dan spesialisasi fungsi dan kewenangan di antara lembaga-lembaga negara namun membentuk suatu fungsi yang terintegrasi.
- 8) B. Kapasitas untuk menunjukkan kinerja, efisiensi dan efektivitas, serta kemampuan menjalankan administrasi secara rasional.
- 9) D. Perubahan di dalam masyarakat yang mengakibatkan perubahan penting di dalam politik.
- 10) A. Kebanyakan negara terdiri dari berbagai kelompok masyarakat berdasarkan etnis, agama, dan/atau ideologi yang berbeda-beda.

### *Tes Formatif 2*

- 1) A. Fakta.
- 2) C. Reformasi.
- 3) A. Sistem.
- 4) C. Perilaku aktor.
- 5) D. Semua jawaban benar.
- 6) A. Struktur pembagian kerja internasional.
- 7) B. Globalisasi dan regionalisasi.
- 8) D. Korea Selatan.
- 9) C. S.P. Varma.
- 10) A. Penjelasan hubungan antara konsep-konsep.

*Tes Formatif 3*

- 1) C. Untuk menciptakan *the good society*.
- 2) D. Semua jawaban benar.
- 3) A. Mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan terlembaga.
- 4) D. Semua jawaban benar.
- 5) A. Proses aplikasinya dan dalam menerima manfaatnya.
- 6) D. Semua jawaban benar.
- 7) D. Semua jawaban benar.
- 8) B. Politik.
- 9) A. Administrasi pemerintahan.
- 10) C. Pengembangan sistem sosialisme.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Almond, Gabriel A., dan G. Bingham Powell. (1978). *Comparative Politics*. London: Little-Brown and Company.
- Anderson, Charles W. (1967). *Issues of Political Development*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Chilcote, Ronald H. (2003). *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Rajawali.
- Higgot, Richard A. (1983). *Political Development Theory*. London: Routledge.
- Kingsbury, Damien. (2007). *Political Development*. London: Routledge.
- Lane, Jan Erik, and Svante Ersson.(1994). *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta: Rajawali.
- McLean, Iain dan Alistair McMillan (Eds.). (2003). *Oxford Concise Dictionary of Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudarsono, Juwono (Ed.). (1976). *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.

### B. Artikel

- Eckstein, Harry. (1982, Juli). "The Idea of Political Development: From Dignity to Efficiency", *World Politics*, Vol. 34 No. 4.
- Huntington, Samuel P. (1965, April). "Political Development and Political Decay", *World Politics*, Vol. 18, No. 3.

- Lieberman, Robert C. (2002, Desember). "Ideas, Institutions, and Political Order: Explaining Political Change", *The American Political Science Review*, Vol. 96, No. 4.
- Milne, R.S. (1972, Desember). "The Overdeveloped Study of Political Development", *Canadian Journal of Political Sciences*, Vol 5, No. 4.
- Pennock, J. Roland, (1966, April). "Political Development, Political System, and Political Goods", *World Politics*, Vol. 18 No. 3.
- Pye, Lucian W. (1965, Maret). "The Concept of Political Development", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 358, New Nations: The Problem of Political Development.
- Ruttan, Vernon W. (1989, Desember). "What Happened to Political Development?", *Bulletin of Economic Development Center* No. 89-10, University of Minnesota.
- Shils, Edward, (1960, Juli). "Political Development in New States: II", *Comparative Studies of Society and History*, Vol. 3 No. 3.
- Shils, Edward, (1960, April). "Political Development in New States", *Comparative Studies of Society and History*, Vol. 3 No. 2.
- Willner, Ann Ruth, (1964, April). "The Underdeveloped Study of Political Development", *World Politics*, Vol. 16 No. 3.